

Analisis Kapasitas Fiskal Kabupaten Jember Tahun 2005-2013

(Analysis of Fiscal Capacity in District of Jember on 2005-2013)

Rozky Eryant Ramadhan, Teguh Hadi, Aisah Jumiati
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan,
Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: rozkyramadhan@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kondisi derajat otonomi fiskal, kondisi tingkat kemandirian daerah, laju pertumbuhan total pendapatan asli daerah dan sumber-sumber pendapatan asli daerah serta struktur pendapatan asli daerah atau kontribusi sumber-sumber pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan asli daerah di Kabupaten Jember setelah pelaksanaan otonomi daerah, pada khususnya antara tahun 2005-2013. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, sumber-sumber pendapatan asli daerah, penerimaan daerah, sumber-sumber penerimaan daerah dan pengeluaran rutin daerah Kabupaten Jember setelah dilaksanakan otonomi daerah, pada khususnya antara tahun 2005-2013. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Biro Pusat Statistik Kabupaten Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat otonomi fiskal Kabupaten Jember setelah pelaksanaan otonomi daerah antara tahun 2005-2013, berada dalam kriteria yang relatif tinggi dengan rata-rata sebesar 71,78%. Indeks kemampuan rutin daerah Kabupaten Jember setelah pelaksanaan otonomi daerah antara tahun 2005-2013 berada dalam kriteria yang relatif tinggi dengan rata-rata sebesar 141,85%. Pola pergerakan laju pertumbuhan total pendapatan asli daerah dan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jember, cenderung memiliki kesamaan. Selisih angka rata-rata laju pertumbuhan penerimaan pajak daerah dengan total pendapatan asli daerah relatif kecil. Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pembentukan total pendapatan asli daerah, tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang lainnya (84,13%).

Kata kunci: Derajat Otonomi Fiskal, Tingkat Kemandirian Daerah, Laju Pertumbuhan, Pendapatan Asli Daerah

Abstract

The purpose of this study was to determine the condition of the degree of fiscal autonomy, condition of the level of independence of the region, the growth rate of total local revenue and sources of local revenues and the structure of local revenues or contributions sources of local revenues to total local revenues in Jember after implementation of regional autonomy, particularly between the years 2005-2013. The unit of analysis used in this study is the regional income, sources of local revenue, local revenue, local revenue sources and expenditure areas Jember routine after execution of regional autonomy, particularly between the years 2005-2013. The data used in this research is secondary data obtained from the Office of Financial Management and the Central Bureau of Statistics in District of Jember. The results showed that the degree of fiscal autonomy Jember after the implementation of regional autonomy between the years 2005-2013, is in a relatively high criteria with an average of 71.78%. Routine capability index Jember region after the implementation of regional autonomy between the years 2005-2013 were relatively high in the criteria with an average of 141.85%. The pattern of movement of the rate of growth in total local revenues and local tax revenue in Jember, tend to have in common. The difference in the average number of local tax revenue growth rate with total local revenues is relatively small. Contribution to the establishment of local tax revenue in total local revenues, recorded much higher compared with other sources of revenue other areas (84.13%).

Keywords: The Degree of Fiscal Autonomy, Level of Regional Independence, Growth, Local Revenue

Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam: UU N0. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan UU N0. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah yang selanjutnya diganti dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, diharapkan dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna bagi penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam otonomi daerah semua kewenangan pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah kecuali bidang pertahanan, peradilan, moneter dan fiskal, luar negeri dan agama serta bidang lain yang akan ditentukan melalui peraturan pemerintah. Penyerahan kewenangan pemerintah tersebut harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, oleh karenanya pemerintah daerah harus memiliki sumber-sumber penerimaan sendiri untuk membiayai pengeluaran dan mendorong terciptanya kemandirian daerah agar mampu bersaing di era globalisasi.

Kapasitas fiskal, sebagaimana ditegaskan oleh Kaho (1998:123), adalah merupakan salah satu kriteria dasar untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (kemandirian daerah) dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Kapasitas fiskal pada dasarnya menunjukkan kemampuan *self-supporting* daerah dalam bidang keuangan. Atau dengan kalimat lain dapat dinyatakan kemampuan kapasitas fiskal daerah adalah merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya.

Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jember sebagai variabel utama pembentuk kekuatan kapasitas fiskal menunjukkan *trend* yang terus-menerus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Di sisi lain anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Jember dalam periode tahun tersebut juga menunjukkan *trend* yang terus-menerus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Akan tetapi ternyata nilai kontribusi (*share*) pendapatan asli daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dalam periode tahun tersebut, ternyata menunjukkan kecenderungan yang berangsur-angsur menurun.

Salah satu indikator yang dapat dipergunakan untuk melihat atau mencermati kondisi kapasitas fiskal daerah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Kuncoro

(1995:9), adalah derajat otonomi fiskal (DOF). Guna dapat melihat seberapa besar derajat otonomi fiskal (DOF) tersebut, dapat dipergunakan pendekatan analisis tingkat kemampuan keuangan daerah (TKKD). Tingkat kemampuan rutin daerah (TKKD), adalah menyatakan rasio perbandingan antara besarnya total pendapatan asli daerah (TPAD) terhadap total penerimaan daerah (TPD).

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kondisi derajat otonomi fiskal, kondisi tingkat kemandirian daerah, laju pertumbuhan total pendapatan asli daerah dan sumber-sumber pendapatan asli daerah serta struktur pendapatan asli daerah atau kontribusi sumber-sumber pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan asli daerah di Kabupaten Jember setelah pelaksanaan otonomi daerah, pada khususnya antara tahun 2005-2013.

Metode Penelitian

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, sumber-sumber pendapatan asli daerah, penerimaan daerah, sumber-sumber penerimaan daerah dan pengeluaran rutin daerah Kabupaten Jember setelah dilaksanakan otonomi daerah, pada khususnya antara tahun 2005-2013.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Biro Pusat Statistik Kabupaten Jember.

Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis Tingkat Kemampuan Rutin Daerah (TKKD), yaitu membandingkan antara besarnya total pendapatan asli daerah (TPAD) terhadap total penerimaan daerah (TPD).
2. Indeks Kemampuan Rutin Daerah (IKRD), yaitu membandingkan antara besarnya total pendapatan asli daerah (TPAD) dengan total pengeluaran rutin daerah (TPRD).
3. Analisis Laju Pertumbuhan, yaitu mengamati laju pertumbuhan (*growth*) total pendapatan asli daerah (rTPAD) dan sumber-sumber pendapatan asli daerah (rSPAD) Kabupaten Jember.
4. Analisis Kontribusi, yaitu membandingkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (SPAD) terhadap total pendapatan asli daerah (TPAD).

Hasil Penelitian

Hasil analisis tingkat kemampuan keuangan daerah (TKKD) Kabupaten Jember setelah pelaksanaan otonomi daerah, pada khususnya antara tahun 2005-2013 (Tabel 1), berada dalam kriteria yang relatif 'tinggi'. Nilai rata-rata tingkat kemampuan keuangan daerah (TKKD) Kabupaten Jember tersebut adalah sebesar 71,78%, dan berada dalam *range* kriteria 'tinggi', yaitu tingkat kemampuan keuangan daerah (TKKD) $\geq 70\%$. Apabila dicermati lebih jauh lagi dari tahun ke tahun, tidak di semua tahun antara tahun 2005-2013 tersebut, memiliki kemampuan kapasitas fiskal daerah yang relatif 'kuat' dalam mendukung Kabupaten Jember melaksanakan otonomi daerah.

Nilai indeks kemampuan rutin daerah (IKRD) Kabupaten Jember setelah pelaksanaan otonomi daerah, pada khususnya antara tahun 2005-2013, berada dalam kriteria yang relatif 'kuat/tinggi'. Hal ini ditunjukkan oleh rata-rata nilai indeks kemampuan rutin daerah (IKRD) yang lebih besar dari 100% (IKRD $> 100\%$).

rutin daerah (IKRD) Kabupaten Jember berada dalam kriteria relatif 'kuat/tinggi', karena berada dalam *range* nilai indeks kemampuan rutin daerah (IKRD) $\geq 100\%$. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dari tahun 2005-2011 tersebut, Kabupaten Jember berada dalam kriteria relatif 'kurang mandiri'.

Laju pertumbuhan (*growth*) total pendapatan asli daerah (r-TPAD) Kabupaten Jember, pada khususnya dalam periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2013, dari tahun ke tahun bergerak relatif fluktuatif. Akan tetapi meskipun bergerak relatif fluktuatif, namun laju pertumbuhannya dari tahun ke tahun selalu bernilai positif. Laju pertumbuhan total pendapatan asli daerah (r-TPAD) dari tahun ke tahun bergerak relatif fluktuatif, akan rata-ratanya diketahui relatif 'cukup tinggi', yaitu mencapai sekitar 16,55% per tahun. Memang pada dasarnya ada beberapa tahun dimana laju pertumbuhannya berada di bawah angka rata-rata laju pertumbuhannya, tetapi juga ada beberapa tahun dimana laju pertumbuhannya berada di atas angka rata-rata laju pertumbuhannya.

Laju pertumbuhan (*growth*) penerimaan pajak daerah (r-tD) di Kabupaten Jember dari tahun ke tahun, pada khususnya dalam periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2013, juga bergerak relatif fluktuatif. Demikian juga relatif sama dengan yang terjadi pada laju pertumbuhan total pendapatan asli daerah (r-TPAD), laju pertumbuhan penerimaan pajak daerah (r-tD) di kabupaten ini, meskipun bergerak relatif fluktuatif dari tahun ke tahun, akan tetapi angka laju pertumbuhannya selalu bernilai positif (tidak pernah bertumbuh negatif). fluktuasi terendah laju

pertumbuhan penerimaan pajak daerah (r-tD) terjadi pada tahun 2006, yaitu hanya tumbuh sekitar 5,43% dari penerimaan pajak daerah tahun sebelumnya. Pada tahun 2006 ini, laju pertumbuhan total pendapatan asli daerah (r-TPAD) juga berada dalam fluktuasi terendah. Sedangkan fluktuasi tertinggi laju pertumbuhan penerimaan pajak daerah (r-tD) terjadi pada tahun 2008, yaitu tumbuh mencapai sekitar 25,37% dari penerimaan pajak daerah tahun sebelumnya. Pada tahun 2008 tersebut, ternyata laju pertumbuhan total pendapatan asli daerah (r-TPAD) juga berada dalam fluktuasi tinggi.

Laju pertumbuhan penerimaan retribusi daerah (r-bD) Kabupaten Jember diketahui relatif berbeda dengan pola pergerakan laju pertumbuhan total pendapatan asli daerah (r-TPAD) dan penerimaan pajak daerah (r-tD). Laju pertumbuhannya memang sama-sama relatif berfluktuatif, akan tetapi pergerakan fluktuasi laju pertumbuhan penerimaan retribusi daerah (r-bD) ada yang positif dan ada pula yang negatif. Oleh karena kondisinya yang demikian ini maka rata-rata laju pertumbuhannya menjadi relatif sangat kecil, yaitu hanya sekitar 2,75% per tahun. Penerimaan retribusi daerah (bD) mengalami penurunan yang relatif sangat besar, yaitu mencapai -75,45% dari penerimaan retribusi daerah (bD) tahun sebelumnya. Sedangkan fluktuasi tertinggi laju pertumbuhan penerimaan retribusi daerah (r-bD) terjadi pada tahun 2012. Dimana penerimaan retribusi daerah (bD) mengalami kenaikan yang juga relatif sangat besar, yaitu mencapai 79,06% dari penerimaan retribusi daerah (bD) tahun sebelumnya.

Laju pertumbuhan penerimaan retribusi daerah (r-bD) yang diketahui berada di bawah angka rata-rata pertumbuhannya dan bertumbuh positif, terjadi pada tahun 2011. Adapun laju pertumbuhan penerimaan retribusi daerah (r-bD) yang diketahui berada di atas angka rata-rata pertumbuhannya (2008 dan 2012). Pergerakan fluktuasi laju pertumbuhan penerimaan laba perusahaan daerah (r-IID) positif dan negatif, tetapi rata-rata laju pertumbuhannya relatif tinggi, yaitu mencapai sekitar 30,14% per tahun. Grafik Perkembangan Laju Pertumbuhan (*Growth*) Penerimaan Laba Perusahaan Daerah (r-IID) Kabupaten Jember Tahun 2006-2013

Pola pergerakan laju pertumbuhan penerimaan pendapatan lain yang sah (r-ID) terdapat Pola pergerakan laju pertumbuhan penerimaan pendapatan lain yang sah (r-ID), dari tahun ke tahun berfluktuasi relatif tajam, polanya sedikit sama dengan pergerakan laju pertumbuhan penerimaan retribusi daerah (r-bD), yaitu positif dan negatif dan berfluktuasi dalam *range* laju pertumbuhan positif-negatif yang relatif kontinyu.

Laju pertumbuhan penerimaan pendapatan lain yang sah (r-ID) Kabupaten Jember yang diketahui berada di bawah angka rata-rata pertumbuhannya dan bertumbuh negatif (2008 dan 2011), sedangkan yang bertumbuh positif pada 2006, 2012 dan 2013. Adapun laju pertumbuhan penerimaan laba perusahaan daerah (r-IID) yang diketahui berada di atas angka rata-rata pertumbuhannya, di antaranya terjadi pada tahun 2007, 2009, dan 2010.

Laju pertumbuhan total pendapatan asli daerah (r-TPAD) relatif cukup dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penerimaan pajak daerah (r-tD). Dimana hal ini dapat menginterpretasikan bahwa, penerimaan pajak daerah (tD) memiliki peranan yang relatif dominan dalam pembentukan total pendapatan asli daerah (TPAD) Kabupaten Jember. Rata-rata kontribusi sumber-sumber pendapatan asli daerah (SPAD) yang lainnya, yaitu : retribusi daerah, hanya sekitar 3,39%, laba perusahaan daerah, hanya sekitar 3,01% dan pendapatan lain yang sah, hanya sekitar 9,97%..

Kontribusi Sumber-sumber PAD terhadap Total Penerimaan PAD Kab. Jember Tahun 2005-2013.

Grafik Perkembangan Nilai Kontribusi Sumber-Sumber PAD terhadap Total Penerimaan PAD Kabupaten Jember Tahun 2005-2013

Pola pergerakan nilai kontribusi pajak daerah (tD) terhadap total pendapatan asli daerah (TPAD) di Kabupaten Jember ini, dari tahun ke tahun bergerak relatif berfluktuasi, tetapi *range* fluktuasi yang terjadi relatif tidak tajam.

Kesimpulan dan Saran

Derajat otonomi fiskal Kabupaten Jember setelah pelaksanaan otonomi daerah antara tahun 2005-2013, berada dalam kriteria yang relatif tinggi dengan rata-rata sebesar 71,78%. Indeks kemampuan rutin daerah Kabupaten Jember setelah pelaksanaan otonomi daerah antara tahun 2005-2013 berada dalam kriteria yang relatif tinggi dengan rata-rata sebesar 141,85%. Pola pergerakan laju pertumbuhan total pendapatan asli daerah dan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jember, cenderung memiliki kesamaan. Selisih angka rata-rata laju pertumbuhan penerimaan pajak daerah dengan total pendapatan asli daerah relatif kecil. Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pembentukan total pendapatan asli daerah, tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang lainnya (84,13%).

Penerimaan retribusi daerah (bD) didorong naik tinggi, karena pada dasarnya potensinya besar akan tetapi nilai kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) relatif sangat kecil dan tingkat pertumbuhan penerimaannya (r-bD) justru memiliki kecenderungan relatif semakin menurun dari tahun ke tahun. Dengan terus-menerus berupaya mendorong agar penerimaan dari laba perusahaan daerah (IID) dapat meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, sehingga nilai kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) menjadi semakin besar. Hal ini sangat diperlukan karena disamping selama ini nilai kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) relatif sangat kecil, tingkat pertumbuhan penerimaannya juga relatif stagnan dari tahun ke tahun.

Daftar Pustaka

Kaho, Y, 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia; Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kaho, Y. 1998, *Prospek Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta UI-Press.

Kuncoro, M, 1995. "*Desentralisasi Fiskal di Indonesia*", Jakarta : Prisma.